

## **LURAH DLINGO**

# KAPANEWON DLINGO KABUPATEN BANTUL PERATURAN KALURAHAN DLINGO NOMOR 02 TAHUN 2024

#### **TENTANG**

# LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2023

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA LURAH DLINGO,

## Menimbang

- : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat kalurahan;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 91 Ayat (1) Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan, Lurah menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Kalurahan kepada Bupati melalui Panewu setiap akhir tahun anggaran;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023.;

# Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1950);
  - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
  - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Indonesia Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) dengan sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
- 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 215);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
- 10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 611);;
- 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
- 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022

- tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
- 13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 819);
- 14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
- 15. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
- 16. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Kepasa Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah istimewa Yogyakarta Nomor 37 tahun 2021 tentang Perubahan Atas peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Kepasa Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 37);
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (lembaran daerah kabupaten Bantul tahun 2019 Nomor 9);
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembarah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8);
- 19. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 7);
- 20. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2019 tentang Siklus Tahunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
- 21. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
- 22. Peraturan Bupati Bantul 87 Tahun 2020 tentang pedoman Teknis penyusunan Produk Hukum

- Kalurahan (Berita Dearah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
- 23. Peraturan Bupati Bantul Nomor 121 tahun 2020 tentang Pedoman Standar Layanan Informasi Publik Kalurahan (Berita daerah Kabupaten bantul Tahun 2020 Nomor 121);
- 24. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul tahun 2019 Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul tahun 2020 Nomor 128);
- 25. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah kabupaten Bantul tahun 2022 Nomor 60);
- 26. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Besaran Bagian Hasil pajak Daerah Untuk Setiap Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 2);
- 27. Peraturan Kalurahan Dlingo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Dlingo Tahun 2019 Nomor 03);
- 28. Peraturan Kalurahan Dlingo Nomor 06 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Dlingo (Lembaran Kalurahan Dlingo Tahun 2020 Nomor 06);
- 29. Peraturan Kalurahan Dlingo Nomor 8 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- 30. Peraturan Kalurahan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kedudukan Keuangan Lurah, PamongBadan Permusyawaratan Kalurahan, Staf Kalurahan dan Staf Honorer Kalurahan Dlingo (Lembaran Kalurahan Dlingo Tahun 2022 Nomor 11);
- 31. Peraturan Kalurahan Dlingo Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kalurahan Dlingo Tahun 2022 Nomor 12);
- 32. Peraturan Lurah Dlingo Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kalurahan Dlingo Tahun 2022 Nomor 13).

# Dengan kesepakatan bersama BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN DLINGO

#### Dan

## LURAH DLINGO

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN DLINGO TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2023

## Pasal 1

Laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut:

## **KEUANGAN**

Ι.	Pendapatan Kalurahan	
	a. Pendapatan Asli Desa	Rp.
	b. Pendapatan Dana Transfer	
	<ul> <li>Dana Desa</li> </ul>	Rp.
	<ul> <li>Bagi Hasil Pajak dan Retribusi</li> </ul>	Rp.
	<ul> <li>Alokasi Dana Desa</li> </ul>	Rp.
	BKK Provinsi	Rp.
	BKK Kabupaten/Kota	Rp.
	Pendapatan Lain-lain	Rp.
	Total Pendapatan	Rp.
2.	Belanja Kalurahan	
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp.
	Kalurahan	κp.
	b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Rp.
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	D.40
		Rp.
	e. Bidang Penanggulangan Bencana,	-
	e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	Rp.
	e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa Total Belanja Kalurahan	Rp.
	e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	-
2	e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa Total Belanja Kalurahan Surplus/(Defisit)	Rp.
3.	e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa Total Belanja Kalurahan Surplus/(Defisit) Pembiayaan Kalurahan	Rp.
3.	e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa Total Belanja Kalurahan Surplus/(Defisit)  Pembiayaan Kalurahan a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.
3.	e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa Total Belanja Kalurahan Surplus/(Defisit)  Pembiayaan Kalurahan a. Penerimaan Pembiayaan b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. Rp. Rp.
3.	e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa Total Belanja Kalurahan Surplus/(Defisit)  Pembiayaan Kalurahan a. Penerimaan Pembiayaan b. Pengeluaran Pembiayaan Pembiayaan Netto	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
3.	e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa Total Belanja Kalurahan Surplus/(Defisit)  Pembiayaan Kalurahan a. Penerimaan Pembiayaan b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. Rp. Rp.

#### Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sebagimana tercantum

dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini yang terdiri atas:

a. Lampiran I : Laporan Keuangan terdiri atas:

1. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB

Kalurahan Tahun 2023;

2. Catatan Atas Laporan Keuangan.

b. Lampiran II : Laporan Realisasi Kegiatan Periode 01 Januari – 31

Desember Tahun Anggaran 2023.

c. Lampiran III : Daftar program sektoral, program daerah dan

program lainnya yang masuk ke Kalurahan

d. Lampiran IV : Datar Rincian Aset Tetap Kalurahan

## Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

#### Pasal 4

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan dan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam lembaran Kalurahan Dlingo.

> Ditetapkan di Dlingo Pada tanggal 23 Februari 2024 LURAH DLINGO, ttd

**AGUS PURNOMO** 

Pangripta,

Di undangkan di Dlingo Pada tanggal 23 Februari 2024 CARIK DLINGO, ttd

MOH. SAMSYUL MALIK

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

ANEWANDEN, S.Si

# LEMBARAN KALURAHAN DLINGO KAPANEWON DLINGO KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024 NOMOR 02

Noreg Peraturan Kalurahan Dlingo Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul : (04/DLG/III/2024)